

**ASPEK HUKUM
KEWASPADAAN NASIONAL PEMILU 2019
PERSPEKTIF KEJAKSAAN RI**



KESADARAN
HUKUM

1

JAKSA MENYAPA

2

JAKSA MASUK SEKOLAH

3

LUHKUM / PENKUM



**PERKARA TINDAK
PIDANA BIASA
OLEH UNSUR PESERTA
PEMILU
MIS: TP. KORUPSI,
NARKOTIKA , UU ITE**



**PERKARA TINDAK PIDANA
PEMILU SEBAGAIMANA
DIATUR DLM UU PEMILU –
DITANGANI OLEH GAKKUMDU
MENGUNAKAN HUKUM
ACARA DLM UU PEMILU**

**PERKARA TINDAK PIDANA BIASA
TERKAIT DGN PENYELENGGARAAN
PEMILU, MIS: UJARAN KEBENCIAN,
HOAX, KERUSUHAN ANTAR PENDUKUNG**





BUKAN TINDAK PIDANA PEMILU

- PELANGGARAN ADM - KODE ETIK

DUGAAN TP.PEMILU – DITERUSKAN KE POLRI

SUMBER: GAKKUMDU-4 MARET 2019

POLITIK UANG

7 PUTUSAN

PEMALSUAN DOKUMEN

8 PUTUSAN

**PELAKSANA, PESERTA, & TIM KAMPANYE
MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE**

21 PUTUSAN

PELAKSANA KAMPANYE MELIBATKAN ORANG YANG
DILARANG UNTUK KAMPANYE

5 PUTUSAN

**KEPALA DESA MELAKUKAN PERBUATAN YANG
MENGUNTUNGKAN PESERTA PEMILU**

9 PUTUSAN

KAMPANYE IKLAN MEDIA MASSA CETAK, MEDIA
MASSA ELEKTRONIK, DAN INTERNET DILUAR JADWAL

2 PUTUSAN

**ASN, TNI, DAN KEPOLISIAN NEGARA IKUT SERTA
SEBAGAI PELAKSANA DAN TIM KAMPANYE**

9 PUTUSAN

KETERANGAN : 10 PUTUSAN PN, 45 PUTUSAN BANDING

SENGKETA/GUGATAN HASIL PEMILU

MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH AGUNG

PTUN

FENOMENA MENGGUNAKAN
SEMUA SARANA YG TERSEDIA
UNTUK MENGHAMBAT
KEBERHASILAN PEMILU

KEJAKSAAN MEMILIKI FUNGSI SEBAGAI PENGACARA NEGARA YANG DAPAT MEWAKILI PENYELENGGARA PEMILU (KPU/BAWASLU) DALAM MENGHADAPI GUGATAN/SENGKETA PEMILU



**JAGA
NEGERI**

1

KAWAL PEMBANGUNAN

2

JAGA DESA

3

PAKEM /WAS BARCET

